**Gambaran *Ca'oca'an* yang Melegalisasi
Pernikahan Dini
Studi Analisis Wacana Kritis dan Analisis Gender¹**

***Describing Ca'oca'an As a Legalization
of Early Marriage
a Critical Discourse Analysis and Gender Study***

Muniri, Lilit Biati, dan Mahsun

**STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, dan
STAI Al-Hamidiyah Bangkalan**

Email: mc.azumy@gmail.com, lilit.baiti@gmail.com, dan mahsun098@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini, mengambil sampel desa Batokorogan dan desa Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat setempat, tentang tiga *ca'oca'an* yang bernuansa legalisasi pernikahan dini, antara lain: (1) "*oreng bhini' mon omor eyattas 12 taon, mon gita' andhi' bhekal eyanggep ta' paju*" (Perempuan yang berumur di atas 12 tahun, jika belum mempunyai tunangan dianggap tidak laku)", (2) "*Andhi' ana' bhini' bhede*h neng kennengan kala, mon bedeh se mentah dilih begi" (Memiliki anak perempuan berada di posisi kalah, kalau ada yang meminang segera terima), (3) "*Je' pasakolah ana'eh mon lo' deddiyeh prabhen toah*" (Jangan disekolahkan anakmu, agar tidak menjadi perawan tua). Tiga *ca'oca'an* ini, sengaja dilestarikan melalui mekanisme klasifikasi, negasi, dan hasrat kekuasaan kaum laki-laki, untuk menciptakan rasa takut pada perempuan menjadi *ta' paju lakeh* dan menjadi *prabhen toah*. Penciptaan rasa takut dengan mekanisme tersebut masuk kategori kekerasan psikis, yang menyebabkan kaum perempuan merasa tidak percaya diri, tidak mampu membuat keputusan mandiri, dan tidak berdaya melakukan penolakan atas keputusan lingkungan sosialnya untuk tidak melakukan pernikahan dini.

Kata Kunci: *ca'oca'an*, pernikahan dini, analisis gender, kritik wacana

Abstract

*This study takes a sample of the Batokorogan and Kokop villages in Bangkalan Madura. This research aims to know the local community opinions about the three Ca'oca'an that nuanced legalization of early marriage, among others; (1) "oreng bhini' mon omor eyattas 12 taon, mon gita' andhi' bhekal eyanggep ta' paju" (Women over 12 years, if they do not have a fiancée are considered unsold)", (2) "Andhi' ana' bhini' bhede*h neng kennengan kala, mon bedeh se mentah dilih begi"

¹ Penelitian ini, dibantu oleh Zuhriyah alumni STAI Al-Hamidiyah Bangkalan dan Siti Romlah Mahasiswa Semester IV STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

dulih beghi" (Having a daughter is in a losing position, if anyone proposes, accept it immediately), (3) "Je' pasakolah ana'eh mon lo' deddiyeh prabhen toah" (Don't send your children to school, so they don't become spinsters). These three *ca'oca'an*s, intentionally preserved through the mechanism of classification, negation, and the desire of male power, to create fear in women become *ta' pajuh lakeh* and become *prabhen toah*. The creation of fear by this mechanism is categorized as psychological violence, which causes women to feel insecure, unable to make independent decisions, and powerless to reject their social, environmental choices not to engage in early marriage.

Keywords: *Ca'oca'an, early marriage, gender analysis, critical discourse analysis*

PENDAHULUAN

*Ca'oca'an*² merupakan hasil pengamatan fenomena sosial, selanjutnya disusun, disampaikan dan menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Meski awal mulanya bersifat '*slentingan*', namun ada keunikan dari subansi sebuah *ca'oca'an*, yang tidak sekedar menyampaikan ketidak jelasan makna dari wacana, melainkan juga korelasinya dengan wacana lain yang hendak dihubungkan, sehingga selain untuk sebuah respon yang insidental atas fenomena sosial dan alam, juga menjadi upaya pengokohan kebenaran transendental.

Rangkaian kalimat dalam *ca'oca'an* umumnya singkat dan padat, hasil dari kristalisasi pengalaman hidup penuturnya.³ Karena rangkaian kalimatnya yang singkat dan mudah diingat, *ca'oca'an* biasanya gampang ditemukan dalam perbincangan keseharian. Pengertian *ca'oca'an* sepadan dengan peribahasa yang dirumuskan oleh Mieder. Menurutnya, peribahasa adalah ungkapan kalimat singkat, mudah diingat, diwariskan dari masa ke masa dan berisi nilai-nilai kebijaksanaan yang dikenal oleh masyarakat luas.⁴

Ca'oca'an sebagai rangkaian bahasa tentu berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa. Sedangkan bahasa dalam pandangan analisis wacana kritis tidak hanya dilihat sebagai alat untuk

² *Ca'oca'an* meliputi *ongkabhan, bhabhasan, saloka, parebhasan, parocabhan, parsemmon*, dan *bangsalan*. Biasanya tertuang dalam *ppareghan, pantun, syi'ir, palengghiren, sendelan, lalongedhan, dan baburugan*. Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya*, (Yogyakarta; Pilar Media, 2007), 197

³ Rifa Efawati, *Figuratif dalam bahasa Madura; Kajian Semantik* (Tesis), (Yogyakarta; Universitas Gajah Mada, 2013), 13

⁴ Wolfgang Mieder, *Proverbs: A Handbook*, (Westpot: Greenwood Press, 2004), 3

memahami realitas objektif belaka yang terpisah dari penuturnya, dan tidak hanya berhubungan dengan upaya penafsiran untuk menemukan makna sesungguhnya tentang tuturan Si Penutur. Lebih dari itu, analisis wacana kritis lebih menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi saat proses produksi dan reproduksi makna.⁵

Penelitian ini, menggunakan teori analisis wacana kritis dalam mengkaji *ca'oca'an* yang substansinya mengarah pada legalisasi pernikahan di usia dini. Mutia Soleha dalam penelitiannya, yang berjudul "Analisis Wacana Nikah Muda pada Akun Twitter @nikahasyik", menggunakan teori analisis wacana sebagai perangkat kajian, memaparkan ulasan akun twitter @nikahasyik yang menganjurkan followernya untuk segera menikah. Melalui twitter ini juga, penulisnya bermaksud merubah kognisi followernya yang mayoritas tidak menyukai pernikahan yang dilakukan di usia dini. Menurutnya, ada dua faktor yang menjadi alasan penolakan terhadap pernikahan di usia dini, kurang umur dan pola pikir yang kekanak-kanakan. Kaduanya saling berkaitan, menurut akun twitter @nikahasyik tidak semua orang yang umurnya muda cenderung kekanak-kanakan, untuk menanggulangi kekanak-kanakan, ia memberikan beberapa tips, salah satunya memberikan gambaran bahwa pernikahan dini dilakukan untuk menghindari maraknya pacaran, dengan menghindari pacaran maka anak muda dijauhkan dari dosa.⁶

Kicauan dalam akun twitter @nikahasyik", bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang (UU) Republik Indonesia tentang Perkawinan yang melarang pernikahan di usia dini. Dalam UU ini, umur menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan, UU perkawinan no. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia menikah, bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun.⁷ Ketentuan umur melangsungkan pernikahan ini selanjutnya dirubah, sebagaimana ketentuan dalam UU no. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1, menyebutkan bahwa

⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 4-7

⁶ Mutia Soleha, *Analisis Wacana Nikah Muda pada Akun Twitter @nikahasyik*" (skripsi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses di <file:///C:/Users/AXIOO/Downloads/analisis%20wacana-pernikahan%20dini-twiter.PDF>, tanggal 31 Oktober 2019.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, (Penerbit Yayasan Peduli Anak Negeri; 1974), 1-15.

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁸

Disamping teori analisis wacana kritis, penelitian ini juga menggunakan teori analisis gender. Teori ini dipakai untuk mengurai relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan lahirnya produksi *ca'oca'an* sebagaimana disebutkan di atas. Penelitian terkait dilakukan oleh Ilham Hidayatullah, Retno Putri, Ter Naotru, Riswanda, dan Muhammad Fedryansyah yang berjudul; "Persepsi Perkawinan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender". Penelitian dilakukan di desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Ada kesamaan temuan data berupa *ca'oca'an* dengan penelitian yang penulis lakukan. Bagi perempuan yang belum menikah padahal dari segi umur sudah layak menikah, jika masih belum menikah disebut "perawan tua". Pemberian *stereotype* ini, memberikan efek kepada orang tua Si Perempuan dan perempuan yang bersangkutan akan merasa terteror. Perasaan terteror tersebut yang menjadi salah satu pendorong mereka bersikap afirmatif terhadap pernikahan di usia dini.⁹

Berbeda dengan penelitian yang tersebut di atas. Penelitian ini membatasi kajiannya sebagaimana dalam rumusan masalah berikut ini; (1) Bagaimana *ca'oca'an* yang bernuansa legalisasi pernikahan dini dalam tinjauan analisis wacana kritis dan analisis gender? (2) Bagaimana efek *ca'oca'an* yang bernuansa legalisasi pernikahan dini bagi masyarakat setempat?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini, adalah; (1) Mendiskripsikan *ca'oca'an* yang bernuansa legalisasi pernikahan dini dalam tinjauan analisis wacana kritis dan analisis gender, (2) Menjelaskan efek *ca'oca'an* yang bernuansa legalisasi pernikahan dini bagi masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>. Diakses pada tanggal 1 Nopember 2019.

⁹ Ilham Hidayatulloh dkk., *Persepsi Perkawinan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender (di desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)*, Pasca Sarjana Sosiologi, FISIP, Universitas Padjajaran. Tulisan ini dimuat di Jurnal SOSIGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 1, Desember 2018. file:///C:/Users/AXIOO/Downloads/18148-55208-1-PB.pdf, diakses, tanggal 04 November 2019.

Penelitian ini menggunakan diskriptif analitis. Dengan metode diskriptif penulis akan menggambarkan keadaan atau fenomena *ca'oca'an* bernuansa legalisasi pernikahan dini. Sedangkan untuk penganalisaan penulis menggunakan tinjauan teori analisis wacana kritis dan analisis gender. Data yang digali merupakan fenomena lingual¹⁰ yang berkaitan dengan pernikahan dini. Data dalam penelitian ini, merupakan hasil wawancara kepada beberapa narasumber, baik yang berlatar belakang tokoh masyarakat, agama, orang tua pelaku pernikahan dini, dan pelaku pernikahan dini desa Batokorogan dan desa Kokop Kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan.

Target yang diharapkan dari narasumber tersebut adalah ranah kesaksian tentang suatu pandangan dan perasaannya, serta interpretasi terhadap *ca'oca'an* yang bernuansa legalisasi pernikahan dini, baik yang ada di benak para pelaku pernikahan dini maupun masyarakat penggunaanya, serta kalangan pemerhati. Hasil wawancara tersebut, selanjutnya dicatat dan klasifikasi berdasarkan kesesuaian dengan analisis wacana kritis dan analisis gender, serta efek *ca'oca'an* bernuansa legalisasi pernikahan dini.

Kombinasi dua metode analisis di bawah ini, dipandang relevan menjawab pokok-pokok rumusan masalah. *Pertama*, analisis wacana kritis, menurut Fairclough dan Wodak sebagaimana dikutip Eriyanto dalam bukunya, analisis wacana kritis merupakan cara melihat pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Konsekuensinya, menghasilkan sebuah kaitan dialektis antara sebuah wacana dengan situasi, institusi, dan strata sosial yang membentuknya. Praktik wacana ini melahirkan efek ideologis yang dapat memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa yang timpang, antara kelas sosial, kelompok mayoritas dan minoritas, dan laki-laki dan perempuan.¹¹

Pada penelitian ini, akan menganalisis relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan melalui tampilan *ca'oca'an* yang umum ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Jika kata *ca'oca'an* disepadankan dengan kata wacana, maka dalam pandangan analisis wacana kritis, *ca'oca'an* tidak dipahami hanya sebatas sebagai studi bahasa, melainkan dihubungkan dengan keadaan tertentu (konteks). Dengan demikian,

¹⁰ Sudaryanto, *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*, (Yogyakarta: Wacana University Press, 1993), 5

¹¹ Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media...*, 7

ca'oca'an yang bernuansa legalisasi pernikahan dini dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, salah satunya praktik penguasaan laki-laki atas perempuan.

Kedua, karena penelitian ini berhubungan dengan relasi laki-laki dan perempuan, maka perlu dilengkapi dengan metode analisis gender. Analisis gender dimulai dengan pembahasan perbedaan antara konsep seks dan gender. Perbedaan konsep seks adalah perbedaan yang secara lahiriah (*kodrati*) melekat pada laki-laki dan perempuan, yakni perbedaan jenis kelamin. Sedangkan gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan hasil dari konstruksi sosial, yang sewaktu-waktu bisa dipertukarkan seiring berjalannya waktu dan tempat, serta kelas (*non kodrati*).¹² Sebenarnya perbedaan gender tidak menjadi masalah, selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, masih kentalnya budaya patriarkhi di masyarakat kita, banyak sekali perilaku menyimpang berupa kekerasan karena bias gender. Kekerasan sebagai efek dari ketidakadilan gender ini banyak bentuknya, antara lain; kebijakan, adat, budaya, agama, dan rumah tangga.¹³ Kaitan metode analisis gender dengan fokus penelitian ini, menelaah kekerasan verbal terhadap perempuan melalui struktur *ca'oca'an* yang mengarah pada legalisasi pernikahan dini yang bernuansa patriarkhi.

HASIL PENELITIAN

1. Profil Desa dan Persentase Pernikahan Dini

Desa Batokorogan berada di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, Desa batokorogan memiliki 4 Dusun yaitu Dusun Korogan Timur, Dusun Korogan Barat, Dusun Krenga' dan Dusun Guwah. Luas wilayah dari Desa Batokorogan seluas 16000 KM², pada bagian utara Desa Batokorogan berbatasan dengan Desa Tanggungguh Kecamatan Tanjung Bumi serta pada bagian barat berbatasan dengan Desa Gunilap Kecamatan Sepulu, bisa dikatakan Desa Batokorogan ini merupakan gerbang dari Kecamatan Kokop. Pada bagian selatan berbatasan dengan Desa Bendasoleh dan pada bagian timur berbatasan dengan Desa Dupok.

¹² Mansour Faqih, *Analisis Gende dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8

¹³ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, (Depok: KataKita, 2010), 21

Kondisi desa Batokorogan cukup berkembang. Hal ini bisa dilihat dari infrastruktur dan aparatur desa yang cukup terpenuhi. Sementara jumlah penduduk, laki-laki berjumlah 1165, perempuan 1182, dan jumlah kepala keluarga 460. Sedangkan data mata pencaharian, 25% mayoritas petani/pekebun, sisanya sebagai 10% pedagang, 15% peternak, 10% Tukang/jual jasa, dan lain-lain (diluar 4 kategori mata pencaharian) berjumlah 40%.

Sedangkan untuk pendidikan formal di desa Batokorogan, mulai tingkat PAUD hingga SMA terdapat 8 (delapan) sekolah, antara lain;

- a. Pos PAUD Al-Miftah
- b. TK Nurul Husain
- c. SDN Batokorogan 01
- d. SDN Batokorogan 02
- e. SMP Al-Ittihad
- f. SMP Negeri 1 Kokop
- g. MA Al-Ittihad
- h. SMA Negeri 1 Kokop

Desa yang menjadi lokus penelitian lainnya, adalah desa Kokop Kecamatan Kokop Kab. Bangkalan. Desa Kokop memiliki 4 Dusun yaitu Dusun Laok Songai, Dusun Kemoning, Dusun Dumajeh dan Dusun Torsobih. Luas wilayah dari Desa Kokop seluas 8,32 KM², pada bagian utara Desa Kokop berbatasan dengan Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop serta pada bagian barat berbatasan dengan Desa Tramok Kecamatan Kokop, bagian selatan berbatasan dengan Desa Genteng Kecamatan Konang dan bagian timur berbatasan dengan Desa Tlokeh Kecamatan Kokop.

Jumlah penduduk, laki-laki berjumlah 2420, perempuan 2425, dan jumlah kepala keluarga 1063. Sedangkan data mata pencaharian, 30% mayoritas petani/pekebun, sisanya sebagai 25% pedagang, 20% peternak, 5% Tukang/jual jasa, dan lain-lain (diluar 4 kategori mata pencaharian) berjumlah 20%. Pendidikan di desa Kokop, antara lain;

- a. SDN 1 Kokop
- b. SDN 2 Kokop
- c. SDN 3 Kokop
- d. SDI Al-Baisuni
- e. SMP Al-Faizin

Mengenai intensitas menikah dini di desa Batokorogan masuk kategori minim, kurang lebih 4,5%, sedangkan di desa Kokop sebaliknya, pernikahan dininya tergolong sangat inten karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, persentasenya mencapai 85%. Data ini, berkesesuaian dengan data persentase pernikahan dini dalam skala kabupaten Bangkalan yang mencapai 17% atau 1.756 dari jumlah pernikahan.¹⁴

Masyarakat setempat, menganggap modus atau pola pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa zina. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, karena motif hamil diluar nikah dan motif ekonomi (meringankan beban ekonomi keluarga/orang tua/melepas tanggung pemenuhan ekonomi anak ke calon suami anaknya). Pernikahan dengan modus dan pola seperti ini, sudah tentu hanya sekedar *ijab-qabul* untuk menghalalkan yang dianggap haram, dan juga faktor ekonomi. Mayoritas pelaku pernikahan di desa tersebut, belum memahami bahwa pernikahan mengharuskan kesiapan moril dan materil dan berbagi apapun kepada pasangannya.¹⁵

2. Pernikahan Dini Merupakan Ajaran Islam

Masyarakat Bangkalan umumnya agamis. Sebagai desa yang berada di kabupaten Bangkalan, desa Batokorogan dan desa Kokop Kecamatan Kokop juga mencitrakan demikian. Citra agamis ini, satu sisi bernilai positif, tapi di sisi yang lain bisa negatif, jika penganutnya tidak mampu membedakan mana ajaran agama, dan mana pemikiran agama.¹⁶ Dua hal ini, penting untuk dipahami perbedaannya dalam memahami kontek pernikahan dini. Apakah pernikahan dini merupakan ajaran agama, atau hanya sebatas pemikiran agama saja.

¹⁴ <http://www.koranmadura.com/2019/06/angka-pernikahan-dini-di-bangkalan-tinggi>. Diakses tanggal 12 Maret 2020

¹⁵ Fakta-fakta ini berdasar pada buku yang ditulis oleh Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, hasil penelitian di berbagai daerah di Indonesia, dan kondisi di Bangkalan kurang lebih sama dengan temuan-temuan dalam penelitian ini, dapat dibaca dalam buku berjudul; *Kesaksian Pengantin Bocah*, (Rumah Kitab bekerjasama dengan Foud Fondation, 2016)

¹⁶ Istilah agama dan pemikiran agama dibahas dengan baik oleh Syafiq Hasyim, menurutnya; "tafsir, fiqih, kalam, tasawwuf adalah pemikiran agama", karena merupakan pemikiran agama, maka hasil ijtihad mujtahid satu dengan lainnya berkecenderungan berbeda walaupun dalil sama-sama diambil dari Alqur'an dan Alhadits. Lihat Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam...*, 26-27

Dalil agama yang dijadikan acuan untuk legalisasi pernikahan dini cukup banyak, namun penulis memilah dua dalil. Satu dalil yang memuat anjuran penyegeraan menikah dan dalil yang satunya tentang posisi perempuan subordinat kaum laki-laki. Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW;

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan tersebut bisa menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredam syahwatnya”.¹⁷

Subtansi hadits ini jelas, bahwa tujuan penyegeraan menikah dalam rangka menghindari perbuatan zina, karena zina masuk kategori perbuatan dosa besar. Hadits yang lain, secara eksplisit yang mengedentikkan perempuan sebagai fitnah terbesar bagi laki-laki. Sabda Rasulullah SAW;

“Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah (cobaan) yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki yaitu (fitnah) wanita”.¹⁸

Hadits ini memberi kesan bahwa perempuan adalah fitnah yang bisa melemahkan iman laki-laki, dan pemicu terjadinya perbuatan zina. Secara tidak langsung memposisikan perempuan sebagai subordinasi bagi laki-laki, yang dalam kacamata gender merupakan salah satu bentuk ketidakadilan.

Dua dalil *naqli* di atas, setidaknya sudah pernah menjadi bagian kajian para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini, bisa dirunut pada pandangan KH. Hasyim Asy'ari tentang perempuan dalam kitabnya, yang menjelaskan bolehnya mengajari perempuan menulis. Kitab tersebut bernilai progresif, karena pada zaman tersebut masih banyak orang yang berpendapat mengajari perempuan akan menimbulkan kerusakan. Seiring penolakan atas pandangan KH. Hasyim As'ari, tapi efeknya merambat pelan memberikan perubahan pada kognisi masyarakat tentang positioning perempuan di tengah masyarakat.¹⁹

¹⁷ HR. Al-bukhari - Muslim

¹⁸ HR. Bukhari no. 5096 dan Muslim no. 7122

¹⁹ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 178

Kurun waktu yang sangat panjang, isu gender belum menemukan bentuk esensialnya, Hingga akhirnya isu gender bersinggungan dengan politik. Pada tahun 1998, saat itu Megawati Soekarno Putri dan Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) sedang naik daun dalam kancah politik nasional. Isu-isu gender sekitar ketertindasan perempuan, merebut ruang public yang didominasi laki-laki, dan lain-lain mengemuka dalam kajian-kajian ilmiah. Dan isu-isu tersebut merembet pada kajian keagamaan sekitar tentang poligami, warisan, kesaksian, imam shalat, dan sebagainya. Tujuan kajian, orientasinya pada keinginan membangun perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan menuju kehidupan sosial yang demokratis.²⁰

Kajian sekitar isu gender disambut oleh aktivis keadilan gender NU dan turut memberikan gagasan mempengaruhi *mindset* dan keputusan forum para Kiyai yang mempunyai otoritas melahirkan keputusan hukum yang berkeadilan gender. Sejumlah Kiyai, antara lain; KH. Abdurrahman Wahid, KH. MA Sahal Mahfudh, KH. Muchit Muzadi, KH. Mustofa Bisri, KH. Masdar Farid Mas'udi, dan KH. Husen Muhammad mendukung penuh keadilan gender yang diusung oleh Fatayat dengan melakukan reinterpretasi doktrin agama dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, namun sebagian besar Kiyai-kiyai masih berpegang teguh pada argumentasi lama, sisanya bersikap moderat terhadap perspektif keadilan gender.²¹

3. Muatan Legalisasi Pernikahan Dini dalam *Ca'oca'an*

Wacana yang menginjeksi rasa takut, baik kepada orang tua yang mempunyai anak perempuan. Ungkapan "*Oreng bhini' mon omor eyattas 12 taon, mon gita' andhi' bhekal eyanggep ta' pajuh* (Perempuan yang berumur di atas 12 tahun, jika belum mempunyai tunangan dianggap tidak laku)". Praktik ditunangkan sejak belia, sebenarnya untuk mengantisipasi resiko *ta' pajuh*. Biasanya, pertunangan sejak belia dilakukan antara sepupu (orang tuanya bersaudara), atau orang tuanya bersahabat karib.

Ungkapan lainnya, peribahasa yang cukup antik, dan sepertinya belum pernah ditemukan oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya. "*Andhi'*

²⁰ *Ibid*, 175-176

²¹ *Ibid*, 176-182

ana' bhini' bhedeh neng kennengan kala, mon bedeh se mentah duli beghi" (Punya anak perempuan berada di posisi kalah, kalau ada yang meminang segera terima). Kalimat *bhedeh neng kennengan kala*, menggambarkan posisi perempuan sebagai objek. Atas dasar otoritas orang tua bisa saja memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak dikehendaki. Sementara itu, anak perempuannya atas dasar patuh sebagai anak, memilih menerima keinginan orang tua, karena *tako' kenning bhelet* (takut kualat) dan *sangkal juduwen* (sulit jodoh). Ungkapan selanjutnya, "*Je' pasakolah ana'eh mon lo' deddiyeh prabhen toah*" (Jangan disekolahkan anakmu, agar tidak menjadi perawan tua). Titik ungkapan ini, ada pada kata *prabhen toah*. Mungkin di era sekarang sudah tidak begitu masyhur menghubungkan antara melanjutkan sekolah dengan ketakutan menjadi *prabhen toah*, walaupun masih ada orang tua yang mengkhawatirkan anaknya, jika melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan takut *ta' pajhuh lakeh* (tidak laku suami/sulit mendapatkan suami).

Tiga ungkapan di atas, kalau dipahami *ending*-nya, mengarah pada upaya menakut-nakuti orang tua pada kemungkinan anak perempuannya menjadi *prabhen toah*. Misalnya, ungkapan "kalau mempunyai anak perempuan berumur di atas 12 tahun belum punya tunangan dianggap tidak laku". Jelas, kata "tidak laku" pada ungkapan tersebut, merupakan kooptasi kognisi orang tua pada kemungkinan anaknya menjadi *prabhen toah*. Demikian juga, ungkapan *bhedeh neng kennengan kala* (ada diposisi kalah) juga bisa mengkooptasi kognisi orang tua, agar terus menerus merasa takut, jika anak perempuannya menjadi *prabhen toah*. Kooptasi ini, selanjutnya terus menginjeksi rasa takut orang tua dan anak perempuannya, sehingga mau tidak mau orang tua memilih mempraktikkan pernikahan dini kepada anak perempuannya.

Colecting data yang berhubungan dengan pendapat atas *ca'oca'an* ini, diperoleh dari pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, tokoh masyarakat, dan tokoh Agama. Hasil wawancara menunjukkan data variatif, ada yang tidak menyepakati, ada juga yang menyepakati *ca'oca'an* di atas. Khusus *ca'oca'an*; "*Je' pasakolah ana'eh mon lo' deddiyeh prabhen toah*", semua narasumber menyatakan setuju, mereka berpendapat; perempuan akhirnya ke dapur juga.

Sementara untuk *ca'oca'an; Orengh bhini' mon omor eyattas 12 taon, mon gita' andhi' bhekal eyanggep ta' pajuh dan Andhi' ana' bhini' bhedeh neng kennengan kala, mon bedeh se mentah duli begi*, semuanya tidak sepakat, karena menganggap *ca'oca'an* ini sudah kadaluarsa (kuno), kalau sekarang sudah bukan zamannya lagi. Rata-rata mereka tidak tau, saat dinikahkan kategori di usia dini, dan juga rata-rata mereka mengaku menikah atas pertimbangan patuh terhadap kehendak orang tua. Data yang ironis, mengaku menikah usia dini karena dibohongi orang tua.

PEMBAHASAN

a. Ajaran Agama, Kondisi Pendidikan, dan Intensi Pernikahan Dini

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, tidak ada satupun masyarakat desa Batokorogan dan desa Kokop beragama non Islam.²² Dilihat dari data tersebut, idealnya dalam interaksi sosial masyarakat desa setempat menjadikan dalil-dalil agama sebagai rujukan untuk memutuskan masalah krusial dalam hidup, misalnya menikah agar disegerakan. Faktanya, data intensitas pernikahan dini di desa Batokorogan dan desa Kokop ternyata berbeda, desa Batokorogan rendah, sedangkan desa Kokop relatif tinggi. Terlepas dari tinggi atau rendahnya jumlah pernikahan dini di dua desa tersebut, tidak menjadi perhatian utama dalam tulisan ini, perhatian lebih pada ada atau tidaknya pernikahan dini. Jika ada, maka bisa diasumsikan bahwa masyarakat di dua desa tersebut, masih menganggap pernikahan dini sebagai salah satu kemaslahatan.

Mencoloknya perbedaan intensi pernikahan dini di desa Batokorogan dan desa Kokop bisa diartikan bahwa anjuran agama untuk menyegerakan menikah tidak menjadi faktor tunggal yang dijadikan acuan untuk menentukan hal krusial hidup. Ada faktor lain, yang menjadikan intensi pernikahan dini di dua desa bisa berbeda, yaitu faktor pendidikan. Di desa Batokorogan, pendidikannya lebih menonjol dari segi kualitas maupun kuantitas daripada pendidikan di desa Kokop. Faktor pendidikan ini, selaras dengan kondisi ekonomi masyarakatnya, juga menjadi penyebab tinggi-rendahnya intensitas pernikahan dini. Namun,

²² Kecamatan Kokop Dalam Angka, tahun terbit 2019

dalam konteks perbandingan intensitas pernikahan dini di dua desa tersebut, maka faktor kondisi pendidikan yang memberikan pengaruh signifikan pada tinggi-rendahnya intensitas pernikahan dini.

b. *Ca'oca'an* dan Strategi Mengabadikan Makna Tunggal

Ca'oca'an yang bernuansa legalisasi pernikahan dini dalam kajian ini, merupakan fokus utama berlangsungnya praktek kuasa wacana. Dengan kritik wacana sebagai pisau analisis, *ca'oca'an* dimaksudkan menjadi gugusan diskursif²³ yang selalu menampilkan kebenaran mutlak. Sedangkan kebenaran mutlak tidak akan pernah terjadi dan tidak mungkin tercapai tanpa menegasikan kebenaran-kebenaran lain yang tidak sehaluan.

Adanya *ca'oca'an* "*Oreng bhini' mon omor eyattas 12 taon, mon gita' andhi' bhekal eyanggep ta' pajuh* (Perempuan yang berumur di atas 12 tahun, jika belum mempunyai tunangan dianggap tidak laku)", "*Andhi' ana' bhini' bhedeh neng kennengan kala, mon bedeh se mentah duli beghi*" (Punya anak perempuan berada di posisi kalah, kalau ada yang meminang segera terima), dan "*Je' pasakolah ana'eh mon lo' deddiyeh prabhen toah*" (Jangan disekolahkan anakmu, agar tidak menjadi perawan tua). Tentunya diusung untuk menggiring khalayak pada jalan pikiran dan kebenaran tertentu.

Pada titik ini, tahapan dalam rangka menyusun dan melestarikan kuasa *ca'oca'an*. Yang *pertama*, melalui mekanisme klasifikasi. Pada tahapan ini, *ca'oca'an* menjadi kepanjangan tangan ajaran agama yang berkaitan dengan anjuran menyegerakan menikah. Dengan segera menikah berarti menghindari terjadinya perzinahan, sedangkan perzinahan merupakan dosa besar, dan jika dosa besar dibiarkan terjadi, semua orang akan mendapatkan kemarahan Sang Pencipta. Dengan logika ini, selanjutnya menjadi standar untuk menggolongkan apa yang harus dilakukan, dan mana yang harus ditinggalkan.

Melalui mekanisme klasifikasi ini, masyarakat tampaknya sangat berkepentingan menciptakan sebuah standar yang pada gilirannya dapat dipakai sebagai penanda atas perempuan dengan kategori *ta' pajuh lakeh*, dan *prabhen toah*. Upaya penandaan sedemikian rupa terus berlanjut pada

²³ Istilah diskursif atau non diskursif sering digunakan Foucault untuk menunjuk kumpulan pernyataan-pernyataan, seperti kedokteran, ekonomi, *oeuvre* atau buku. Karen itu, Foucault lebih suka berbicara tentang formasi diskursif (*formation discursive*) daripada ilmu, teori, dan sebagainya. Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan* Terjemah dari buku *The Arkeology of Knowledge*, penerjemah Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: BASABASI, 2019), 64-65

penilaian perempuan dimaksud, menjadi perempuan “yang baik” dan “yang buruk”. Padahal sebenarnya, tidak ada hubungan alamiah antara bentuk atau penanda dengan makna atau penanda. Sebagaimana dikatakan Saussure yang dikutip oleh Piliang, bahwa hanya konvensi sosial sajalah yang mengatur, dan penciptaan petanda dan penanda seolah ada makna substantifnya.²⁴

Sebagian masyarakat desa Batokorogan dan desa Kokop, khususnya yang menikah di usia dini mengalami ketakutan menjadi perempuan *ta' paju lakeh* dan *prabhen toah*. Sebenarnya, mayoritas dari pelaku pernikahan dini, khususnya dari pihak perempuan (istri), mereka beranggapan adanya rasa takut tidak muncul dari dirinya sendiri saja, mereka mendapatkan injeksi ketakutan yang signifikan dari kedua orang tuanya. Sedangkan orang tuanya, mendapatkan injeksi ketakutan dari lingkungan masyarakat desa setempat yang cara pandangannya setuju dengan pernikahan dini.²⁵

Kedua, mekanisme negasi. Mekanisme ini merupakan tahapan peneguhan pemberian tanda atas perempuan dengan kategori *ta' paju lakeh*, dan *prabhen toah* disepadankan dengan penilaian pada perempuan yang sudah cukup umur, tapi belum menikah dianggap “yang buruk”. Dapat dipahami, untuk menjadikan pendapat orang lain salah, maka dengan sendirinya kita membutuhkan argumen pembenar dari sekian pendapat, dalam konteks *ca'oca'an* ini, legitimasinya adalah dalil al-Qur'an dan al-Hadits. Apalagi mayoritas dari mereka, cara beragamanya masih berada diderajat *taqlid* tentu sangat minim referensi lain, mereka tidak mungkin menyimpang dari ajaran yang sudah ada dan menjadi kebiasaan, ditambah lagi pembenaran oleh figur otoritas (tokoh agama) di desa setempat.

Ca'oca'an yang dilegitimasi dengan al-Qur'an dan al-Hadits, dan dibenarkan oleh figur otoritas, merupakan sebuah proses pembentukan dan konstruksi realitas dengan tujuan adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal,²⁶ dan tentu berguna untuk

²⁴ Yasraf Amir Piliang, *Semiotika dan Hipersemiotika; Kode, Gaya, dan Matinya Makna*, (Bandung: Matahari, 2012), 365

²⁵ Cara pandang afirmatif terhadap pernikahan dini ini, penulis temukan di desa Kokop, berbeda dengan pernikahan dini di desa Batokorogan, cara pandang masyarakat desa setempat tidak begitu signifikan pengaruhnya terhadap keputusan orang tua anak perempuan untuk menikah dini.

²⁶ Dalam pengertian analisis framing, upaya-upaya membentuk realitas dengan legitimasi tertentu, tujuannya adalah ideologisasi untuk tujuan mewujudkan kepentingan perseorangan atau kelompok. Dalam kajian legalisasi pernikahan dini, yang

mendisiplinkan kognisi perempuan agar menyegerakan menikah. *Ketiga, ca'oca'an* ini adalah hasrat kekuasaan yang ditelikungkan pada medan lain. Target untuk mewujudkan obsesi mengabadikan patriarkhisme Islam atas pertimbangan hasrat penguasaan terhadap perempuan. Patriarkhisme nantinya lambat laun menjadi sebuah pengetahuan, yang akhirnya dijadikan alat legitimasi hasrat kelelakian, dan tentunya dengan satu tujuan, yaitu menjadikan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki.²⁷

c. *Ca'oca'an Tinjauan Analisis Gender*

Perbedaan gender, walaupun bukan penyebab tunggal yang berpotensi melahirkan ketidakadilan, baik bagi laki-laki terutama terhadap kaum perempuan. Sebagai sebuah sistem dan struktur, ketidakadilan gender menggelinding dan menyebar ke bagian-bagian terkecil dalam sistem dan struktur masyarakat. Efek krusialnya, semua orang dalam segala umur dimungkinkan tidak ada yang lolos dari kekerasan verbal yang bernuansa ketidakadilan gender.

Menurut Mansour Faqih, ketidakadilan gender mewujud dalam ketidakadilan dalam bentuk marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, *stereotype*, beban kerja, dan kekerasan.²⁸ Dalam tulisan ini, penulis mengkhususkan terhadap kajian perwujudan ketidakadilan gender berupa kekerasan. Sebuah kekerasan dari efek *ca'oca'an* yang diperuntukkan melegalkan pernikahan dini, melalui mekanisme klasifikasi, negasi, dan hasrat berkuasa kaum laki-laki terhadap kaum perempuan.

Faqih menyebutkan, sekurang-kurangnya ada delapan kategori sebagai kekerasan gender, antara lain; pemerkosaan perempuan, termasuk juga perkosaan dalam perkawinan, pemukulan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, penyiksaan yang mengarah kepada organ alat

dimaksud bisa seorang laki-laki, atau sekelompok laki-laki. Untuk memahami analisis framing, bisa dilihat dalam buku karya Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2015).

²⁷ Michel Foucault memandang bahwa kuasa dan pengetahuan saling berkaitan, pada keduanya terdapat relasi yang saling memperkembangkan. Faktanya, tidak ada kuasa yang tidak dikukuhkan oleh pengetahuan, dan sebaliknya tidak ada pengetahuan yang tak dikukuhkan dengan kuasa. Dalam tulisan ini, *ca'oca'an* menjadi pengetahuan untuk mengukuhkan berlangsungnya pernikahan dini. P. Sunu Hardianta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2016), 33

²⁸ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12

kelamin (*genital mutilation*), pelacuran, pornografi, sterilisasi dalam Keluarga Berencana (KB), kekerasan terselubung (memegang bagian tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan, tanpa kerelaan Si pemilik tubuh), dan pelecehan seksual.²⁹

Musdah Mulia menambahkan, ada beberapa penyebab kekerasan terjadi terhadap perempuan, antara lain; ketimpangan gender, perlindungan hukum yang kurang memadai, dominasi nilai-nilai patriarkhi, pemahaman agama yang bias. Menurutnya, apapun bentuknya kekerasan terhadap perempuan, siapapun pelakunya merupakan sebuah kejahatan dan bertentangan dengan esensi agama.³⁰ Membaca kategori-kategori dan macam-macam kekerasan terhadap perempuan sebagaimana paparan Mansour Faqih dan Musdah Mulia, penulis memandang *ca'oca'an* yang dimaksud dalam kajian tulisan ini, lebih dekat korelasinya dengan kategori kekerasan psikis berupa ketakutan, rasa malu, rasa terpaksa sehingga perempuan merasa tidak ada pilihan lain, kecuali memilih menikah, walaupun di usia dini.

Sebagaimana yang terjadi pada perempuan-perempuan yang melakukan pernikahan dini di desa Batokorogan dan desa Kokop, mayoritas (tidak semuanya) mereka melakukan pernikahan dini bukan murni pilihan hatinya, mereka merasa takut *sangkal* (sulit jodoh) jika menolak lamaran, takut menjadi *prabhen toah* (perawan tua), dan merasa ditipu oleh orang tuanya.³¹ Mereka mengalami kekerasan psikis,³²

²⁹ *Ibid*, 17-20

³⁰ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus, 2015), 75-80

³¹ Hasil wawancara ke sejumlah pelaku pernikahan dini, umumnya orang tuanya yang memaksa atau menipu anak perempuannya agar menikah padahal belum cukup umur. Mereka tidak tau bahwa pernikahan dini memungkinkan pelakunya (pihak perempuan) mengalami resiko yang cukup mengkhawatirkan, antara lain; (a) Mental yang rapuh pasangan menikah dini dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga, sedikit banyak mempengaruhi kondisi anak. Menikah diusia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek, dan berisiko mudah kena penyakit jantung dan pembuluh darah (BKKBN, 2012). (b) Cenderung gagal dalam rumah tangga. Alasan perceraian biasanya bukan karena alasan menikah muda, melainkan ekonomi dan lain sebagainya (Walgito, 2000). (c) Rentan secara biologis. Belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa remaja yang sulit disembuhkan. Hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Mestinya, usia ideal perempuan untuk menikah adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun, karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya

sehingga menyebabkan mereka hilang rasa percaya dirinya, hilang kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya untuk menolak keputusan orang tua dan sistem sosial - budaya di desanya.

Efek *ca'oca'an* benar-benar menyebarkan pandangan oposisional laki-laki dan perempuan. Dari pandangan oposisional inilah, selanjutnya laki-laki menancapkan posisionalitasnya sebagai yang memiliki nilai tawar lebih di atas perempuan. Padahal, dalam konteks pembangunan, bias gender tidak hanya perempuan yang menjadi korban, di ruang tertentu bisa laki-laki yang menjadi korban diskriminasi gender. Untuk itu, laki-laki perlu memahami dan mendukung perubahan dalam hubungan gender, karena sangat diperlukan dalam menciptakan keseimbangan sosial yang lebih adil antar jenis kelamin di tengah masyarakat.³³

Sebaliknya, jika tanpa adanya kesadaran dari kaum laki-laki, justru nilai tawar tersebut bisa berlanjut pada tindakan diskriminatif, dengan memberikan *stereotype* negatif pada perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan perempuan. Ditambah lagi legitimasinya dengan memberi kesan bahwa perempuan adalah fitnah yang bisa melemahkan iman laki-laki, dan pemicu terjadinya perbuatan zina. Dalam kacamata analisis gender, pemberian *stereotype* negatif sedemikian rupa, merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan dan jauh dari esensi ajaran agama.

PENUTUP

Ada tiga kesimpulan penting sebagai penutup dari tulisan ini, *Pertama*, bahwa ajaran agama yang menganjurkan agar segera menikah, tidak menjadi pertimbangan utama melakukan pernikahan dini, ada kondisi yang sangat berpengaruh, yakni kondisi pendidikan. Perbandingan kualitas dan kuantitas pendidikan di desa Kokop relatif rendah daripada pendidikan di desa Batokorogan.

Kedua, *ca'oca'an* yang bernuansa legalisasi pernikahan dini dalam kajian ini, "*oreng bhini' mon omor eyattas 12 taon, mon gita' andhi' bhekal*

sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik psikis emosional, ekonomi dan sosial.

³² Ada empat macam kekerasan dalam rumah tangga, antara lain; 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual, 4)Penelantaran rumah tangga. Lihat Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), 5-6

³³ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 9

eyanggep ta' pajuh (Perempuan yang berumur di atas 12 tahun, jika belum mempunyai tunangan dianggap tidak laku)", "*Andhi' ana' bhini' bhedeh neng kennengan kala, mon bedeh se mentah duli beghi*" (Punya anak perempuan berada di posisi kalah, kalau ada yang meminang segera terima), dan "*Je' pasakolah ana'eh mon lo' deddiyeh prabhen toah*" (Jangan disekolahkan anakmu, agar tidak menjadi perawan tua). Memang sengaja dilestarikan melalui mekanisme klasifikasi, negasi, dan hasrat kekuasaan kaum laki-laki, untuk menciptakan rasa takut pada perempuan, untuk tidak menjadi perempuan *ta' pajuh lakeh* dan *prabhen toah*.

Ketiga, perbedaan gender memang bukan penyebab tunggal yang berpotensi melahirkan ketidakadilan, namun sistem dan struktur ketidakadilan gender bisa memicu kekerasan verbal. Dari beberapa kategori kekerasan dalam konteks diskriminasi gender, kajian *ca'oca'an* yang bernuansa legalisasi pernikahan dini, masuk dalam kategori kekerasan psikis, yang menyebabkan kaum perempuan merasa tidak percaya diri, tidak mampu membuat keputusan mandiri, dan tidak berdaya melakukan penolakan atas keputusan lingkungan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2012)

Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2015).

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>. Diakses pada tanggal 1 Nopember 2019.

<http://www.koranmadura.com/2019/06/angka-pernikahan-dini-di-bangkalan-tinggi>. Diakses tanggal 12 Maret 2020

Ilham Hidayatulloh dkk., *Persepsi Perkawinan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender (di desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)*, Pasca Sarjana Sosiologi, FISIP, Universitas Padjajaran. Tulisan ini dimuat di Jurnal SOSIGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 1, Desember 2018. file:///C:/Users/AXIOO/Downloads/18148-55208-1-PB.pdf, diakses, tanggal 04 November 2019.

HR. Al-bukhari – Muslim

HR. Bukhari no. 5096 dan Muslim no. 7122

- Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Kecamatan Kokop Dalam Angka, tahun terbit 2019
- Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, *Kesaksian Pengantin Bocah*, (Rumah Kitab bekerjasama dengan Foud Fondation, 2016)
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasannya*, (Yogyakarta; Pilar Media, 2007)
- Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, (Yogyakarta: BASABASI, 2019)
- Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus, 2015)
- Mutia Soleha, *Analisis Wacana Nikah Muda pada Akun Twitter @nikahasyik*" (skripsi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses di <file:///C:/Users/AXIOO/Downloads/analisis%20wacana-pernikahan%20dini-twiter.PDF>), tanggal 31 Oktober 2019.
- P. Sunu Hardianta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2016)
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), 5-6
- Rifa Efawati, *Figuratif dalam bahasa Madura; Kajian Semantik* (Tesis), (Yogyakarta; Universitas Gajah Mada, 2013)
- Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, (Depok: KataKita, 2010)
- Sudaryanto, *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*, (Yogyakarta: Wacana University Press, 1993)
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, (Penerbit Yayasan Peduli Anak Negeri; 1974)
- Wolfgang Mieder, *Proverbs: A Handbook*, (Westpot: Greenwood Press, 2004)
- Yasraf Amir Piliang, *Semiotika dan Hipersemiotika; Kode, Gaya, dan Matinya Makna*, (Bandung: Matahari, 2012)